



iskominfo
KOTA SUKABUMI - spirit of sharing -

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025–2029

*Dinas Kominikasi dan
Informatika Kota Sukabumi*



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029 merupakan kebijakan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mandat yang diberikan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen Renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan di Kota Sukabumi, terutama pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian melalui penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, baik dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025–2029 ini disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Sukabumi, 19 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SUKABUMI,

Ir. Hj.ENDAH ARUNI, M.T.
Pembina Tk.I
NIP. 19670709 199703 2 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika	9
2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	43
2.2.1 Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika	43
2.2.2 Isu Strategis	45
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	49
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	50
3.3 Strategi	54
3.4 Arah Kebijakan	55
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	57
4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan 2025-2029	113
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	114

4.4	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	115
4.5	Program dukungan Perangkat Daerah terhadap Jabar Istimewa	116
4.6	Program Dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Terhadap Capaian Asta Cita	118
BAB V.	PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasar Status Kepegawaian	18
Tabel 2.2. Susunan Pegawai Dinas Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	19
Tabel 2.3. Gambaran Aset yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	19
Tabel 2.4. <i>Review</i> Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	39
Tabel 2.6. Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika per Sub Urusan	41
Tabel 2.7. Sarana Penyebaran Informasi	42
Tabel 2.6. Isu Strategis	47
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2030	52
Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2026-2030	54
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029	55
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 2025-2029	59
Tabel 4.2 Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi	90
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	113
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	114
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikai dan Informatika	116
Tabel 4.6 Program Dukungan Terhadap Jabar Istimewa	117
Tabel 4.7 Program Dukungan Terhadap Asta Cita	118

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi	17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Diskominfo Kota Sukabumi	50
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	51

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-
2029.

**SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025-2029**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada poin kedua huruf b menyatakan bahwa Wali Kota/Wakil Wali Kota agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Salah satu upaya untuk mencapai harapan tersebut diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L.

Perencanaan strategis merupakan pendekatan untuk mencapai suatu tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan keamanan informasi. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu strategis yang dihadapi, pemikiran, dan analisis yang mendalam dan komprehensif, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi.

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi memiliki peran sangat penting dan strategis. Hal ini tanpa alasan mengingat dengan adanya perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang begitu pesat akan memberi dampak perubahan begitu besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Rencana Strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi adalah untuk mendukung tercapainya Visi Misi Kota Sukabumi.

Perencanaan yang baik dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi sebagai langkah strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta program unggulan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah Kota Sukabumi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah dibuat sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan program kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar pembuatan Rencana Kebijakan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sementara Rencana Kebijakan Anggaran (RKA) yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan RAPBD yang kemudian menjadi APBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renstra, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan ...

18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi;
34. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 149 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui program, kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja (renja);
- b. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan Program dan kegiatan, pemantuan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan Renja yang memuat program, Kegiatan dan Subkegiatan.
3. Dasar evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya perangkat daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);
7. Program dukungan Perangkat Daerah terhadap Jabar Istimewa; dan
8. Program dukungan Perangkat Daerah terhadap capaian Asta Cita;

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 149 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 149).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 149 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;

b. merumuskan ...

- b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang meliputi pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian, dan keamanan informasi layanan *e-government*, penyelenggaraan statistik sektoral, persandian, dan keamanan informasi;
- d. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- e. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- h. melaksanakan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- i. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- j. melaksanakan penyelenggaraan pejabat pengelola informasi Pemerintah Daerah atau *government chief information officer*;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- h. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahkan:

➤ **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:

- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
- d. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
- f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
- g. mencatat, memelihara, dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
- h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:

- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- j. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- k. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- m. membuat laporan keuangan Dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- o. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan komunikasi;
- g. penyelenggaraan penyiaran publik lokal dan layanan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan pengolahan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- i. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang aplikasi informatika berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas serta pengelolaan *e-government*;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika aspek aplikasi dan informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas serta pengelolaan *e-government*;
- d. penyelenggaraan perencanaan arsitektur aplikasi, pembangunan, pengembangan dan pendampingan aplikasi dalam fasilitasi pembangunan *smart city*;
- e. penyelenggaraan pengelolaan integrasi sistem informasi dan layanan interoperabilitas layanan publik dan pemerintahan, dan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan *website* resmi Dinas dan *website* resmi Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang aplikasi informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. penyusunan ...

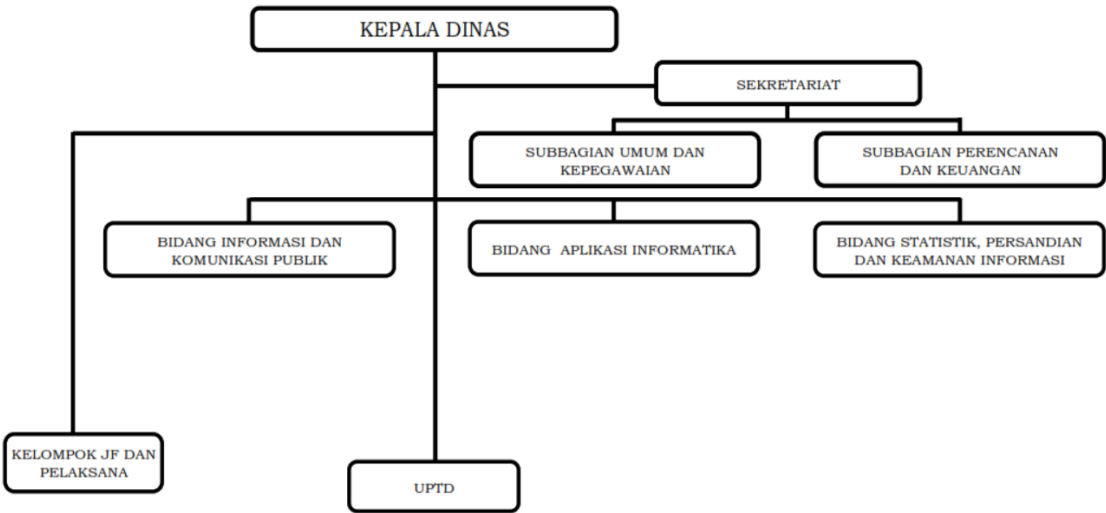
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang statistik, persandian dan keamanan informasi berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan tugas di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- d. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- e. persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- f. persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan informasi berklasifikasi dan keamanan informasi bersertifikasi, serta indeks keamanan informasi;
- h. penyelenggaraan penyiapan dan distribusi pemusnahan perangkat lunak dan keras dan pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, fasilitas layanan persandian;
- i. penyelenggaraan inventarisasi aset persandian serta perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah dan daerah lain;
- j. penyelenggaraan pengelolaan *security operations center*;
- k. penyelenggaraan pendampingan dan bantuan teknis persandian dan keamanan informasi;
- l. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

- a. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- b. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - ketua tim; dan
 - anggota tim.
- c. Ketua tim sebagaimana berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- d. Ketua tim sebagaimana dimaksud melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visual Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Sumber : Perwal Kota Sukabumi Nomor 149 Tahun 2022

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Data Pegawai

Ketersediaan sumber daya manusia tentunya sangat dominan dalam penyelenggaraan pelaksanaan organisasi. Dapat disampaikan bahwa pegawai pada Dinas berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 (dua puluh lima) Orang, PPPK berjumlah 2 (dua) Orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 13 (tiga belas) orang dan masih terdapat Tenaga Sukarela (TKS) berjumlah 8 (delapan) orang dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasar Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negeri (ASN)	
	a. PNS	25 Orang
	b. PPPK	2 Orang
2.	THL	13 Orang
3.	TKS	8 Orang
	Jumlah	48 Orang

Sumber : DUK Diskominfo 2025

Tentunya jumlah ini bila dihubungkan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi amatlah kurang, terlebih lagi bila dikaitkan dengan aspek kompetensi/spesifikasi keahlian maupun dengan latar belakang pendidikan.

Tabel 2.2
Susunan Pegawai Dinas Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan							Jumlah
		I	II	III	IV	PPPK	THL	TKS	
1.	SLTP	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	SLTA	-	-	-	-	-	4	5	9
3.	D3	-	-	3	-	-	1	1	5
4.	Sarjana (SI)	-	-	12	-	2	8	1	23
5.	Pasca Sarjana	-	-	3	5	-	-	1	9
6.	Doktor	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		-	1	18	6	2	13	8	48

Sumber : DUK Diskominfo 2025

B. Keadaan Perlengkapan

Sebagai unit kerja yang mengemban tugas di beberapa bidang seperti bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandaian dan keamanan informasi yang tentunya sangat banyak dampaknya untuk masyarakat kota sukabumi, tentunya sarana dan prasarana menjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pimpinan Daerah. Gambaran keadaan inventaris (aset) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Gambaran Aset yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
	Peralatan dan Mesin							
	Alat Angkutan							
	Alat Angkutan Darat Bermotor							
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
1	MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	TOYOTA AVANZA 1,3 MT			F 414 S	1	UNIT	BAIK
2	MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	SUZUKI AVP MT			F 432 S	1	UNIT	BAIK
3	MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	SUZUKI AVP MT			F 441 S	1	UNIT	KURANG BAIK
4	MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	AVANZA 1300 E/			F 453 S	1	UNIT	BAIK
5	MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	TOYOTA RUSH			F 1045 S	1	UNIT	KURANG BAIK
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua							
6	Sepeda Motor							
7	Sepeda Motor	HONDA WIN			F 2748 S	1	UNIT	KURANG BAIK
8	Sepeda Motor	HONDA			F 2749 S	1	UNIT	KURANG BAIK
9	Sepeda Motor	HONDA NF 125			F 2966 S	1	UNIT	BAIK
10	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X			F 3043 S	1	UNIT	KURANG BAIK
11	Sepeda Motor	HONDA NF 125			F 3289 S	1	UNIT	BAIK
12	Sepeda Motor	YAMAHA/2 BU AT			F 3615 S	1	UNIT	BAIK
13	Sepeda Motor	YAMAHA/2 BU AT			F 3616 S	1	UNIT	BAIK
14	Sepeda Motor	YAMAHA/2 BU AT			F 3685 S	1	UNIT	BAIK
15	Sepeda Motor	YAMAHA/2 BU AT			F 3686 S	1	UNIT	BAIK
16	Sepeda Motor	YAMAHA SE88/			F 3781 S	1	UNIT	BAIK
17	Sepeda Motor	YAMAHA SE88/			F 3818 S	1	UNIT	BAIK
18	Sepeda Motor	YAMAHA SE88			F 3881 S	1	UNIT	BAIK
19	Sepeda Motor	YAMAHA			F 3969 S	1	UNIT	BAIK
	Perkakas Standard (Standard Tools)							
20	Tool Kit Set							
21	Tool Kit Set	HOZAN				1	SET	BAIK
	Alat Kantor dan Rumah Tangga							
	Alat Kantor							
	Mesin Ketik							
22	Mesin Ketik Elektronik/Selekt rik	NAKAJIMA		NAKAJIMA A640		1	UNIT	KURANG BAIK
	Alat Reproduksi (Penggandaan)							

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
23	Mesin Fotocopy Folio	CANON IMAGE RUNNER				1	UNIT	BAIK
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor							
24	Lemari Besi/Metal	DEXON OFFICE EQUIPMENT				3	UNIT	BAIK
25	Lemari Kayu					2	UNIT	KURANG BAIK
26	Lemari Kayu					4	UNIT	BAIK
27	Rak Besi	CITOS				30	UNIT	BAIK
28	Filing Cabinet Besi	BROTHER				10	UNIT	BAIK
29	Filing Cabinet Besi	FILLING CABINET VIP V-304				2	UNIT	BAIK
30	Filing Cabinet Besi	FILLING CABINET FC E FR				1	UNIT	BAIK
31	Filing Cabinet Besi	HAND IN HAND SERIES FC-H3				2	UNIT	BAIK
	Alat Kantor Lainnya							
32	Papan Visual/Papan Nama	NAMA DISKOMINF O				1	UNIT	BAIK
33	Alat Penghancur Kertas	HSB SHREEDER X5				1	UNIT	BAIK
34	Alat Penghancur Kertas	SECURE PAPER SHREDDER				1	UNIT	BAIK
35	Alat Penghancur Kertas	SECURE				1	UNIT	BAIK
36	Alat Penghancur Kertas	KOZUR (KS-8900C)				2	UNIT	BAIK
37	LCD Projector/Infocus	EPSON / SVGA				1	UNIT	BAIK
38	LCD Projector/Infocus	-				1	UNIT	BAIK
39	LCD Projector/Infocus	-				1	UNIT	BAIK
40	LCD Projector/Infocus	SAMSUNG				1	UNIT	BAIK
41	LCD Projector/Infocus	BENQ				1	UNIT	BAIK
	Alat Rumah Tangga Mebel							
42	Meja Kerja Kayu	MEJA KERJA KAYU				5	UNIT	BAIK
43	Meja Kerja Kayu	MEJA KERJA KAYU				6	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
44	Meja Kerja Kayu	MEJA KERJA KAYU				1	UNIT	BAIK
45	Meja Kerja Kayu	MEJA KERJA KAYU				1	UNIT	BAIK
46	Meja Resepsionis	MEJA DAN BACKDROP				1	UNIT	BAIK
47	Meja Panjang	MEJA STUDIO				1	UNIT	BAIK
48	Meja 1/2 Biro	MEJA 1/2 BIRO				2	UNIT	BAIK
49	Meja 1/2 Biro	MEJA KERJA KARYAWAN				1	UNIT	BAIK
50	Meja 1/2 Biro	NEXTSTAR				6	UNIT	BAIK
51	Kursi Rapat					12	UNIT	BAIK
52	Kursi Rapat	SPIDER G				25	UNIT	BAIK
53	Kursi Tamu					1	UNIT	BAIK
54	Kursi Tamu					1	UNIT	BAIK
55	Kursi Putar	JVQ KOENIG				18	UNIT	BAIK
56	Kursi Putar					2	UNIT	BAIK
57	Bangku Tunggu					1	UNIT	BAIK
	Alat Pendingin							
58	A.C. Split	TOSHIBA				1	UNIT	BAIK
59	A.C. Split	LG				1	UNIT	BAIK
60	A.C. Split	CHANGHON G				1	UNIT	KURANG BAIK
61	A.C. Split	TCL				1	UNIT	BAIK
62	A.C. Split	HAIER				1	UNIT	BAIK
63	A.C. Split	SAMSUNG				1	UNIT	BAIK
64	A.C. Split	PANNASONI C				6	UNIT	BAIK
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							
65	Televisi	SAMSUNG				4	UNIT	BAIK
66	Televisi	SAMSUNG				1	UNIT	BAIK
67	Sound System					1	UNIT	BAIK
68	Microphone					1	UNIT	BAIK
69	Tangga Aluminium					1	UNIT	BAIK
70	Handy Cam	PANASONIC / HC-V520				1	UNIT	BAIK
71	Handy Cam	SONY /HDR- XR550V				1	UNIT	BAIK
72	Handy Cam	SONY HDR- CX 405				1	UNIT	BAIK
73	Handy Cam	HANDYCAM PANASONIC				1	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
	Kursi Kerja Pejabat							
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	GAMING CHAIR				1	UNIT	BAIK
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar							
	Alat Studio							
	Peralatan Studio Audio							
75	Audio Mixing Console	MIXING AUDIO YAMAHA				1	UNIT	BAIK
76	Audio Mixing Portable	DROUNED 4 CHANEL				2	UNIT	BAIK
77	Microphone/Wireless MIC					1	UNIT	BAIK
78	Microphone/Wireless MIC					2	UNIT	BAIK
79	Microphone/Wireless MIC					1	UNIT	BAIK
80	Microphone/Boom Stand	HARTLEY SPIRAL				1	UNIT	BAIK
81	Microphone/Boom Stand	BEHRINGER / C1 FOX FILTER				1	UNIT	BAIK
82	Microphone/Boom Stand	SENSHEISER				1	UNIT	BAIK
83	Professional Sound System	BEHRINGER				1	UNIT	BAIK
84	Professional Sound System	BEHRINGER				1	UNIT	BAIK
85	Audio Master Control Unit	EURO POWER PMP 100 / 12 CHANNEL				1	UNIT	BAIK
86	Audio Master Control Unit	SOUNDCRAFT				1	UNIT	BAIK
87	Audio Master Control Unit	SOUNDCRAFT				1	UNIT	BAIK
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)					1	UNIT	BAIK
89	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS PROLINK 1200VA				1	UNIT	BAIK
90	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS PROLINK 1200VA				1	UNIT	BAIK
91	Uninterruptible Power Supply (UPS)	LIEBERT				1	UNIT	BAIK
92	Receiver VHF/FM					1	UNIT	BAIK
93	Audio Tape Reel Recorder	SHARP				1	UNIT	BAIK
94	Microphone Cable					1	UNIT	BAIK
95	Voice Recorder	SONY DIGITAL				1	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
	Peralatan Studio Video dan Film							
96	Assignment Switcher	ASSIGNMENT SWITCHER				1	UNIT	BAIK
97	Video Distribution Amplifier	VIDEO SENDER				1	UNIT	BAIK
98	Teleprompter	TELEPROMPTER				1	UNIT	BAIK
99	Tripod Camera					1	UNIT	BAIK
100	Lensa Kamera	CANON EF 70-300MM F/4-5.6				1	UNIT	BAIK
101	Lensa Kamera	SONY				1	UNIT	BAIK
102	Camera Digital	CANON EOS 6D				1	UNIT	BAIK
103	Camera Digital	NIKON / DSLR D7100				1	UNIT	BAIK
104	Camera Digital	KAMERA CANON DSLR 1500D				2	UNIT	BAIK
105	Camera Digital	KAMERA SONY ALPHA A7 MARK				1	UNIT	BAIK
106	Camera Digital	KAMERA PANASONIC LUMIX G7				1	UNIT	BAIK
107	Camera Digital	CANON - DIGITAL - EOS - 800D				1	UNIT	BAIK
108	Camera Digital	LOGITECH PTZ PRO 2				4	UNIT	BAIK
109	Camera Digital	CAMERA DSLR				1	UNIT	BAIK
110	Camera Digital	SAMSUNG				1	UNIT	BAIK
111	Camera Digital	CANON	HITAM			1	UNIT	BAIK
	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah							
112	GPS Receiver					1	UNIT	KURANG BAIK
113	GPS Receiver					1	UNIT	BAIK
114	Kamera Udara	DJI				1	UNIT	BAIK
115	Kamera Udara	MAVIC 2 PRO				1	UNIT	BAIK
116	Kamera Udara	DJI MAVIC 2 PRO				1	UNIT	BAIK
117	Kamera Udara	DJI MAVIC PRO FLY MORE				1	UNIT	BAIK
	Alat Studio Lainnya							
118	Dst... (Alat Studio Lainnya)	STABILIZER DSLR				1	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
119	Dst... (Alat Studio Lainnya)	SOUNDCAR D				1	UNIT	BAIK
	Alat Komunikasi							
	Alat Komunikasi Telephone							
120	Telephone Mobile	SAMSUNG GALAXY				1	UNIT	BAIK
121	Handy Talky (HT)	HT ICOM V85				6	UNIT	BAIK
122	Handy Talky (HT)	ICOM 16K0F3E/1 1K0F3E				8	UNIT	BAIK
123	Facsimile	PANASONIC FT-987				1	UNIT	BAIK
124	Dst... (Alat Komunikasi Telephone Lainnya)	DIAMOND				1	UNIT	BAIK
125	Dst... (Alat Komunikasi Telephone Lainnya)	FREQUENSI CONTER				1	UNIT	BAIK
126	Dst... (Alat Komunikasi Telephone Lainnya)	SWR METER				1	UNIT	BAIK
127	Dst... (Alat Komunikasi Telephone Lainnya)	AVO METER DIGITAL				1	UNIT	BAIK
128	Dst... (Alat Komunikasi Telephone Lainnya)	SWR TUNER METER				2	UNIT	BAIK
	Alat Komunikasi Radio VHF							
129	Unit Tranceiver VHF Stationary	PESAWAT RADIO VHF RIG				2	UNIT	BAIK
	Alat-Alat Sandi							
130	Handphone Encription	ANDROID SAMSUNG GALAXY A9				1	UNIT	BAIK
131	Handphone Encription	ANDROID SAMSUNG GALAXY S9				1	UNIT	BAIK
132	Handphone Encription	ANDROID SAMSUNG GALAXY S8				1	UNIT	BAIK
133	Handphone Encription	APPLE IPAD				2	UNIT	BAIK
134	Handphone Encription	SAMSUNG GALAXY S4				1	UNIT	BAIK
135	GSM Jammer	GSM JAMMER				1	UNIT	BAIK
136	Repeater RX/TX					1	UNIT	

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
	Peralatan Pemancar VHF/FM							
137	Dst... (Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya)	PEMANCAR RADIO				1	UNIT	BAIK
138	Dst... (Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya)	TABUNG EXICER				1	UNIT	BAIK
	Switcher/Menara Antena							
139	Self Supporting Tower							
140	Self Supporting Tower	TOWER RSPD				1	UNIT	BAIK
141	Guy Tower							
142	Guy Tower	TOWER				1	UNIT	KURANG BAIK
143	Guy Tower	TOWER				1	UNIT	KURANG BAIK
144	Guy Tower	TOWER TRIANGLE				1	UNIT	KURANG BAIK
145	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
146	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
147	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
148	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
149	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
150	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
151	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
152	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 15 M 16 MM				1	UNIT	KURANG BAIK
153	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20M 16MM				1	UNIT	KURANG BAIK
154	Guy Tower	TOWER TRIANGLE 20M 16MM				1	UNIT	KURANG BAIK
155	Guy Tower	TOWER TRIANGLE				1	UNIT	KURANG BAIK
	Program Input Equipment							

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
156	Audio Processor AM	BW DSP X MINI				1	UNIT	KURANG BAIK
157	Audio Processor AM					1	UNIT	BAIK
	Sumber Tenaga							
158	Genset					1	UNIT	BAIK
	Komputer							
	Komputer Unit							
	Personal Computer							
159	P.C Unit							
160	P.C Unit	LENNOVO				3	UNIT	KURANG BAIK
161	P.C Unit	HP PAVILLION				1	UNIT	KURANG BAIK
162	P.C Unit	RAKITAN				1	UNIT	BAIK
163	P.C Unit	ASUS				1	UNIT	KURANG BAIK
164	P.C Unit	DELL				2	UNIT	BAIK
165	P.C Unit	LENNOVO AIO ALL IN ONE				2	UNIT	BAIK
166	P.C Unit	APEL IMAC				1	UNIT	BAIK
167	P.C Unit	HP AIO 24				4	UNIT	BAIK
168	P.C Unit	ASUS				1	UNIT	BAIK
169	P.C Unit	ASUS ROG DESKTOP				1	UNIT	BAIK
170	P.C Unit	DELL INSPIRON				3	UNIT	BAIK
171	P.C Unit	ASUS				1	UNIT	BAIK
172	P.C Unit	ASUS				1	UNIT	BAIK
173	P.C Unit	ASUS				2	UNIT	BAIK
174	P.C Unit	INTEL NUC				1	UNIT	BAIK
175	P.C Unit	Komputer PC	Lenovo AIO neo	Thinkcenter Core i5		1	UNIT	BAIK
176	P.C Unit	ACER VERITON X				1	UNIT	BAIK
177	P.C Unit	ALL IN ONE PC CORE I7				1	UNIT	BAIK
178	P.C Unit	ALL IN ONE PC CORE I7				1	UNIT	BAIK
179	P.C Unit	ALL IN ONE PC CORE I7				1	UNIT	BAIK
180	P.C Unit	ALL IN ONE PC CORE I3				1	UNIT	BAIK
183	Lap Top							
184	Lap Top	ACER				1	UNIT	KURANG BAIK
185	Lap Top	ASUS				1	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
186	Lap Top	LENOVO YOGA PRO				1	UNIT	BAIK
187	Lap Top	ACER SWIFT GO 14 TOUCH				1	UNIT	BAIK
188	Lap Top	ASUS ZENBOOK				1	UNIT	
	Note Book							
189	Note Book	HP				1	UNIT	KURANG BAIK
190	Note Book	ASUS A455LD				3	UNIT	KURANG BAIK
191	Note Book	ASUS				1	UNIT	KURANG BAIK
192	Note Book	LENNOVO				4	UNIT	KURANG BAIK
193	Note Book	LENNOVO				3	UNIT	KURANG BAIK
194	Note Book	DELL INSPIRON 7567 BLACK				1	UNIT	BAIK
195	Note Book	APPLE MACBOOK				1	UNIT	BAIK
196	Note Book	ASUS				3	UNIT	BAIK
197	Note Book	ASUS VVIVI MINI VM65				1	UNIT	BAIK
198	Note Book	LENOVO NB V330				1	UNIT	BAIK
199	Note Book	ASUS				1	UNIT	BAIK
200	Note Book	MACBOOK PRO 2020 M1				2	UNIT	BAIK
201	Note Book	DELL INSPIRON 15 7591 core i7				1	UNIT	BAIK
202	Note Book	DELL AMD				1	UNIT	KURANG BAIK
203	Note Book	ASUS				1	UNIT	BAIK
204	Note Book	TOSHIBA				1	UNIT	BAIK
205	Note Book	ASUS	TYPE S430 U			1	UNIT	KURANG BAIK
206	Tablet PC	SAMSUNG TAB A BLACK				1	UNIT	KURANG BAIK
207	Tablet PC	SAMSUNG TAB A SILVER				2	UNIT	KURANG BAIK
208	Tablet PC	SAMSUNG GALAXY TAB				2	UNIT	BAIK
209	Tablet PC	APPLE IPAD MINI				1	UNIT	BAIK
210	Tablet PC	SAMSUNG GALAXY TAB S6				1	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
	Peralatan Komputer							
	Peralatan Mainframe							
211	Hard Disk	HDD SERVER ADATA SATA III SSD				1	UNIT	KURANG BAIK
212	Hard Disk	EXTERNAL SSD DRIVE 512 GB				2	UNIT	BAIK
213	Hard Disk	VGA EKSTERNAL				1	UNIT	BAIK
214	Hard Disk	SEAGATE				3	UNIT	BAIK
215	Dst... (Peralatan Mainframe Lainnya)					1	UNIT	KURANG BAIK
	Peralatan Personal Computer							
216	Monitor							
217	Monitor	SAMSUNG / LED S22D300HY				1	UNIT	BAIK
218	Monitor	ASUS				1	UNIT	BAIK
219	Monitor	SAMSUNG LED LS24F350F HEXXD				1	UNIT	BAIK
220	Monitor	ATEN				1	UNIT	BAIK
221	Printer (Peralatan Personal Komputer)							
222	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L110				1	UNIT	KURANG BAIK
223	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L310				1	UNIT	KURANG BAIK
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L1300				2	UNIT	KURANG BAIK
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3110				2	UNIT	KURANG BAIK
226	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L220				1	UNIT	KURANG BAIK
227	Printer (Peralatan Personal Komputer)	TP-LINK				1	UNIT	BAIK
228	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON PRINTER WF-7211]				1	UNIT	BAIK
229	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON INKJET PRINTER [L1110]				2	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	INKJET PRINTER WF-3721				1	UNIT	BAIK
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L6190				2	UNIT	BAIK
232	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON				1	UNIT	BAIK
233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER				1	UNIT	BAIK
234	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON				1	UNIT	BAIK
235	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L1210				1	UNIT	BAIK
236	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L1210				1	UNIT	BAIK
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)							
237	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	CANON				1	UNIT	BAIK
238	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON				1	UNIT	KURANG BAIK
239	External/ Portable Hardisk	EXTERNAL HARDISK				2	UNIT	BAIK
240	External/ Portable Hardisk	EXTERNAL HARDISK 2 TB				2	UNIT	BAIK
241	External/ Portable Hardisk	SEAGATE				2	UNIT	BAIK
242	Dst... (Peralatan Personal Komputer Lainnya)							
243	Dst... (Peralatan Personal Komputer Lainnya)	Hardisk Internal	SAS enterp rise	3,5 16TB SATA 7200 RPM		1	UNIT	BAIK
	Peralatan Jaringan							
244	Server	PROLIANT ML350G4-506				1	UNIT	KURANG BAIK
245	Server	-				1	UNIT	KURANG BAIK
246	Server	-				1	UNIT	KURANG BAIK
247	Server	IBM SYSTEM / X3250M5-B2A				1	UNIT	BAIK
248	Server	-				1	UNIT	BAIK

No	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek / Tipe	Spesifikasi Lainnya	Kendaraan Dinas *)	Jumlah	Satuan	Kondisi
					Nomor Polisi			
249	Server	DELL				1	UNIT	BAIK
250	Server	MONITOR TOUCHSCREEN LED	DELL			1	UNIT	BAIK
251	Server	SSD SATA 3 2,5 INCH 2 TB				5	UNIT	BAIK
252	Router	ROUTER				1	UNIT	BAIK
253	Router	ROUTER				4	UNIT	BAIK
254	Router	LINKSYS				10	UNIT	BAIK
255	Router	UBIQUITI				1	UNIT	BAIK
256	Router	UBIQUITI				5	UNIT	BAIK
257	Router	MIKROUTIK				1	UNIT	BAIK
258	Router	MIKROTIK				1	UNIT	BAIK
259	Router	MIKROTIK				5	UNIT	BAIK
260	Hub							
261	Hub					1	UNIT	BAIK
262	Hub					1	UNIT	BAIK
263	Hub	D-LINK				2	UNIT	BAIK
264	Hub					2	UNIT	BAIK
265	Hub					2	UNIT	BAIK
266	Modem							
267	Modem					1	UNIT	BAIK
268	Rak Server	RAK SERVER				1	UNIT	BAIK
269	Rak Server	INDORACK				1	UNIT	BAIK
270	Dst... (Peralatan Jaringan Lainnya)	Server Storage	Synology DS220			1	UNIT	BAIK
	Peralatan Komputer Lainnya							
271	Dst... (Peralatan Komputer Lainnya)	WIRELESS SIGNAL CHECKER	Apple ipad air			1	UNIT	KURANG BAIK
272	Dst... (Peralatan Komputer Lainnya)	USB EXTENDER				1	UNIT	BAIK
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi							
	Jalan dan Jembatan							
	Jaringan Telepon							
	Jaringan Telepon Lainnya							
273	Dst... (Jaringan Telepon Lainnya)	Dst... (Jaringan Distribusi Lainnya)				1	UNIT	BAIK

Sumber : Data barang pengguna Diskominfo 31 Desember 2024

Berdasarkan data inventaris sarana dan prasarana kerja, dari total 273 item aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, mayoritas aset berada dalam kondisi baik sebanyak 225 unit (82,5%). Sementara itu, terdapat 48 unit aset (17,5%) yang berada dalam kondisi kurang baik/kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sarana dan prasarana masih cukup memadai untuk mendukung kinerja, namun diperlukan perhatian khusus dan upaya perbaikan atau penggantian terhadap aset yang kondisinya kurang baik agar tidak menghambat pelayanan dan operasional dalam upaya mendukung kinerja pegawai dalam memaksimalkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, pengelolaan data statistik dan Pengelolaan Persandian untuk Keamanan Informasi. Diskominfo bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

a) Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Elektronik

Dinas Kominfo bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem elektronik untuk pemerintahan dan pelayanan publik, mencakup sistem informasi, infrastruktur TIK, dan pengembangan aplikasi. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah berbasis elektronik dilaksanakan melalui penilaian indeks SPBE yang di selenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b) Pengelolaan Informasi Publik

Diskominfo memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) memantau sejauh mana hak publik atas informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan.

c) Pelayanan ...

c) Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Diskominfo menyediakan layanan pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik untuk menindaklanjuti dan memproses pengaduan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d) Pengelolaan Data Statistik

Diskominfo mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan dan evaluasi pembangunan serta mendukung pengambilan kebijakan.

e) Pengelolaan Persandian untuk Keamanan Informasi

Diskominfo Kota Sukabumi memiliki tugas penting dalam melakukan pengelolaan persandian untuk keamanan informasi di tingkat pemerintah daerah meliputi: melindungi informasi daerah, menerapkan teknologi pengamanan informasi, pengelolaan layanan sertifikasi elektronik dan koordinasi dengan BSSN dan instansi vertikal.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tergambar jelas pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target					Realisasi				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai SAKIP Diskominfo	-	-	√	Persen	70	70	70	70	72	66,89	71,81	71,96	72,11	72,3
2	Indeks SPBE	-	-	√	Indeks	2,2	2,3	2,4	2,5	3	2,72	2,98		2,98	3,79
3	Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-	-	√	Persen	80	70	75	80		78,12	100	100	75	
4	Indeks keamanan informasi daerah	-	-	√	Indeks	45	19	20	21		80,80	62,95	63,41	30	
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	√	Persen	38,84	45	55	65		46,70	74	75	90,96	
6	Persentase tindak lanjut pengaduan	-	-	√	Persen	88	90	94	96		100	100	100	100	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	√	Persen	80,50	80,0	85	85		73,12	86,025	86,03	88,01	
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	√	-	Persen	N/A	35	35	35		N/A	9,68	9,68	9,68	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target					Realisasi				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	√	-	Persen	N/A	35	35	35		N/A	75,76	74,19	35	
10	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	-	-	√	Kelompok	N/A	N/A	1	3		N/A	N/A	3	4	
11	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	√	-	Persen	N/A	50	50	50		N/A	50	55	51	
12	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	-	√	-	Persen		50	50	50			50	55	51	
13	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	√	-	Persen		60	62	64			76,93	65	65	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target					Realisasi				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan efisien	-	-	√	Persen		70%	70%	70%			70%	70%	70%	

Sumber : Data diolah oleh DIskominfo

Sesuai data tabel diatas dapat terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi memiliki 14 indikator kinerja, meskipun setiap tahunnya ada beberapa indikator kinerja yang sudah tidak di targetkan lagi. Akan tetapi Selama kurun waktu 5 tahun dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja bahwasanya terdapat tren positif dimana indikator kinerja dapat tercapai dengan sesuai target yang sudah ditentukan meskipun ada beberapa realisasi indikator yang masih dibawah target atau mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, diantaranya :

- Capaian indikator Persentase OPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yakni menjadi 75%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya serangan siber pada website perangkat daerah yang mengakibatkan penghapusan sebanyak 8 website. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran untuk pengembangan TIK turut menjadi kendala dalam upaya antisipasi dan pengendalian pasca serangan.
- Capaian Indeks Keamanan Informasi daerah pada tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun demikian, jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, capaian tersebut sebenarnya telah melampaui target yang ditetapkan. Penurunan target pada tahun-tahun berikutnya dipengaruhi oleh

kondisi ...

kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yang berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi sistem penganggaran serta kinerja, khususnya dalam urusan keamanan informasi hingga tahun 2023.

- Capaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini baru terdapat tiga perangkat daerah yang difasilitasi akses internet oleh Diskominfo Kota Sukabumi, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Ketidaktercapaian target tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi program internet satu pintu, yang terkendala karena belum adanya kebijakan pengalihan anggaran biaya internet dari masing-masing perangkat daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, program tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
- Capaian Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya 21 layanan publik dari total 109 aplikasi/layanan publik yang tersedia. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan metode perhitungan. Pada tahun 2021 dan 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah *subdomain* yang terkoneksi dengan sukabumi.go.id, sedangkan pada tahun 2023 perhitungan mencakup aplikasi/layanan yang telah online dan terintegrasi dengan website Kementerian atau jabarprov.go.id. Selain itu, meskipun jumlah total layanan publik meningkat, tidak semua layanan dapat segera disediakan secara online maupun terintegrasi. Hal tersebut menyebabkan persentasenya menurun meskipun jumlah layanan online bertambah.
- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik serta mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan rumus perhitungan dari pemerintah pusat, sehingga ketika dilakukan penghitungan ulang dengan rumus yang baru hasilnya

menunjukkan penurunan. Selain itu, berkurangnya alokasi anggaran akibat efisiensi juga berdampak pada terbatasnya kegiatan penyebarluasan informasi.

Selain itu, capaian realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.5 berikut. Penyajian data tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran dan tingkat realisasi yang dicapai setiap tahunnya, sehingga dapat terlihat tren perkembangan pendanaan serta efektivitas penggunaannya dalam mendukung program dan kegiatan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Pagu Anggaran	6.990.796.338	5.737.931.724	6.277.034.209	5.938.196.681	6.890.068.556	5.702.077.101	5.650.595.647	6.222.207.322	5.873.113.365	6.829.359.877

Sumber : Data diolah oleh DIskominfo

D. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terbagi menjadi dua yaitu kelompok sasaran layanan administrasi pemerintahan dan kelompok sasaran layanan publik. Kelompok sasaran layanan administrasi pemerintahan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta unsur pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sementara itu, kelompok sasaran layanan publik sangat beragam, mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam dunia komunikasi dan informasi. Secara umum, kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Warga Masyarakat

Ini termasuk individu-individu yang tinggal di wilayah kota sukabumi, yang menjadi penerima informasi publik, layanan publik, laporan pengaduan dan berbagai program yang digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Media

Dinas Komunikasi dan Informatika juga melayani media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, untuk penyebaran informasi publik dan koordinasi dalam kegiatan publikasi.

c) Pemerintah

Ini termasuk pejabat pemerintah, perangkat daerah, dan instansi terkait, yang membutuhkan informasi dan layanan komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintahan.

d) Pelaku Usaha

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan dukungan dan informasi terkait teknologi informasi, komunikasi, dan media kepada pelaku usaha di wilayah tersebut.

e) Organisasi

Ini meliputi organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai organisasi yang beraktivitas di wilayah tersebut.

f) Penyelenggara Layanan Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika juga melayani penyelenggara layanan publik, seperti operator telekomunikasi, penyedia internet, dan penyedia jasa teknologi informasi.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga seringkali menysasar kelompok-kelompok khusus seperti:

a) Grup ...

a) Grup Rentan

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan layanan informasi dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan seperti orang lanjut usia, disabilitas, dan kelompok-kelompok yang kesulitan mengakses informasi.

b) Penyedia Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan layanan dan dukungan kepada penyedia informasi dan komunikasi, seperti radio komunitas, media online lokal, dan penyedia konten.

Secara keseluruhan, kelompok sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sangat luas dan mencakup berbagai lapisan masyarakat dan pihak yang terlibat dalam dunia komunikasi dan informasi di Kota Sukabumi.

E. Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika

Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika per Sub Urusan

Urusan/ Sub Urusan	Mitra
Komunikasi	Kementerian Komunikasi dan Digital
	Komisi Peyiaran Informasi Daerah (KPID)
	Komunitas Informasi Masyarakat
	Relawan TIK
	Media Kota Sukabumi
Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital
	Provider Kota Sukabumi
Statistik	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
	Badan Pusat Statistik
	Badan Informasi Geospasial

Urusan/ Sub Urusan	Mitra
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi
Persandian	Badan Siber dan Sandi Negara

F. Sarana Penyebaran Informasi yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

Dari aspek ketersediaan sarana penyebaran informasi yang menunjang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi urusan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi memiliki aset sarana penyebaran informasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Sarana Penyebaran Informasi

No.	Uraian	Unit Kerja Pengampu
1.	Website Perangkat Daerah https://diskominfo.sukabumikota.go.id/	Bidang Aplikasi dan Informatika
2.	Website Pemerintah Kota Sukabumi https://sukabumikota.go.id/	Bidang Aplikasi dan Informatika
3.	Manajemen email mail@sukabumikota.go.id	Bidang Aplikasi dan Informatika
4.	Radio Swara Perintis 93.1 FM (Instagram, TikTok, Youtube dan Facebook)	Bidang Informasi Komunikasi Publik
5.	Media sosial Perangkat Daerah meliputi (Instagram, Tiktok, Youtube dan Facebook)	Bidang Informasi Komunikasi Publik
6.	Website PPID https://ppid.sukabumikota.go.id/	Bidang Informasi Komunikasi Publik
7.	Manajemen email ppid@sukabumikkota.go.id	Bidang Informasi Komunikasi Publik
8.	Website Penyebaran Data Statistik https://opendata.sukabumikota.go.id	Bidang Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi
9.	Manajemen email diskominfo@sukabumikota.go.id	Sekretariat

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi secara cepat guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta membangun partisipasi masyarakat yang aktif. Dalam konteks tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang peran strategis sebagai motor penggerak transformasi digital daerah berkaitan dengan pengelolaan informasi, teknologi digital, komunikasi publik, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*).

2.2.1 Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam melaksanakan transformasi digital di pemerintahan dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya:

- a) **Tuntutan pelayanan publik yang cepat dan mudah serta belum optimalnya penerapan e-Government:** Dalam UN E-Government Survey 2024, Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB dengan nilai 0.79911.
- b) **Belum optimalnya keamanan informasi dan integrasi:** Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tantangan signifikan terkait serangan siber terhadap aplikasi dan sistem digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mencatat setidaknya lebih dari 200 serangan siber. Serangan-serangan ini menyasar berbagai website dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dengan tujuan yang bervariasi, mulai dari upaya pencurian data hingga pengujian celah keamanan pada sistem pemerintah.
- c) **Belum optimalnya pemenuhan akses internet pada Perangkat Daerah di Kota Sukabumi:** Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tantangan dalam pemenuhan akses internet yang optimal di lingkungan Perangkat Daerah meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan digital. Diskominfo Kota Sukabumi pada tahun 2024 hanya bisa memfasilitasi 3 Perangkat daerah dari total 31 Perangkat Daerah untuk pemenuhan akses internet yang diantaranya Sekretariat Daerah, Diskominfo dan BPKPD untuk mengatasi hal tersebut diharapkan pemenuhan akses internet bisa dilaksanakan Satu Pintu oleh Diskominfo. Penerapan sistem internet satu pintu bertujuan untuk mengendalikan *bandwidth* secara terpusat. Langkah ini diharapkan dapat

menghemat ...

menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan internet di seluruh Perangkat Daerah.

- d) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung sistem pemerintahan berbasis elektornik yang belum memadai:** meskipun Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya memperkuat infrastruktur TIK, masih terdapat keterbatasan yaitu konektivitas yang belum merata, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja aplikasi dan sistem digital yang digunakan dalam pelayanan publik, selain itu Kompetensi SDM di bidang TIK menjadi faktor penting dalam implementasi SPBE. Hal ini diperkuat dengan data internal yang menunjukkan bahwa jumlah Pegawai di Diskominfo yang terbatas jika dikaitkan dengan aspek kompetensi/spesifikasi keahlian maupun dengan latar belakang pendidikan hanya 19 orang (39%) dari total 48 Pegawai Diskominfo (ASN,THL dan TKS). Tentunya jumlah ini bila dihubungkan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi amatlah kurang sehingga kondisi ini menimbulkan beberapa kendala strategis dalam pelaksanaan program SPBE.
- e) Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik dan Tuntutan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintahan:** Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari prinsip *good governance*, yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. di Kota Sukabumi, pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi kelembagaan, sistem, maupun sumber daya manusia diantaranya tidak adanya komisi informasi di pemerintah Kota Sukabumi, kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan informasi publik, termasuk dalam klasifikasi dan dokumentasi informasi, tingkat literasi masyarakat yang bervariasi, menyebabkan partisipasi dan permintaan informasi belum optimal serta rendahnya diseminasi informasi tentang kebijakan dan hasil pembangunan daerah belum tersebar luas.
- f) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral:** Data sektoral merupakan elemen penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah Kota Sukabumi membutuhkan data sektoral yang lengkap, akurat, terkini, dan dapat diakses lintas sektor agar proses pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun, hingga saat ini, ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal. Hal

ini dikarenakan beberapa masalah diantaranya belum semua Perangkat Daerah (PD) menyusun dan mengelola data sektoral secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2024 jumlah PD yang melakukan pengisian data sektoral hanya 24 PD dari total 31 PD. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua PD memiliki SDM khusus/kompeten dalam manajemen data dan pengoperasian sistem aplikasi data sektoral serta tidak terpenuhinya standar data dan metadata, sehingga data yang diinput sering tidak dapat digunakan lintas sektor.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting yang menjabarkan fokus utama organisasi dalam menghadapi tantangan dan mendukung pencapaian visi-misi Kepala Daerah, berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka isu strategisnya yang relevan dengan fenomena dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yaitu **Transformasi Digital Pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang transparan, aman dan terintegrasi**. Transformasi digital pemerintahan merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mendorong semua instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh dan terintegrasi.

Di Kota Sukabumi, transformasi digital mulai dilakukan, terbukti dengan capaian indeks SPBE di tahun 2024 adalah 3.79 dengan skor indeks SPBE maksimal 5, berdasarkan hal tersebut implementasi SPBE masih menghadapi berbagai tantangan teknis, regulatif, dan kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dan kebijakan yang tepat untuk mendorong SPBE yang transparan, aman, dan terintegrasi.

Adapun dampak dari tidak terlaksananya Transformasi Digital Pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang transparan, aman dan terintegrasi diantaranya:

- Layanan publik menjadi tidak efisien, tidak responsif, dan tidak terpusat.
- Meningkatnya risiko kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan.
- Rendahnya kepercayaan publik terhadap kualitas layanan digital pemerintah.

- Tingginya biaya operasional akibat tumpang tindih sistem informasi.
- Nilai Indeks SPBE tidak optimal dalam penilaian nasional.

Penentuan isu strategis Diskominfo Kota Sukabumi didasarkan pada pemetaan permasalahan, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta faktor-faktor lingkungan yang dinamis di tingkat global, nasional, dan regional sebagaimana tercantum pada Tabel. 2.6.

Tabel 2.6 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Pembangunan	Tuntutan pelayanan publik yang cepat dan mudah serta Belum Optimalnya penerapan e- Government	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama dengan daerah berbatasan	- Dalam UN E- Government Survey 2024, Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB dengan nilai 0.79911 - Kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG's) -Kesenjangan Digital	- Transformasi digital nasional sedang menjadi <i>concern</i> pemerintah pusat - Capaian indeks SPBE nasional pada tahun 2024 adalah 3,12 dari skala 5, dengan predikat "Baik" -Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur TIK	- Indeks SPBE Pemerintah Kota Sukabumi urutan 18 Kota/Kab Se Jawa Barat dengan nilai indeks 3.79 - Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan daerah - tata kelola data statistik - Integrasi data dan informasi	Transformasi Digital Pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang transparan, aman dan terintegrasi
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung sistem pemerintahan berbasis elektornik yang belum memadai					
	Belum optimalnya pemenuhan akses internet pada Perangkat Daerah di Kota Sukabumi					
	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik dan Tuntutan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintahan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral		- <i>Cyber insecurity</i>	-Disinformasi dan Hoaks	- Aplikasi berstandar Keamanan	
	Belum optimalnya keamanan data informasi dan integrasi			-terjadi insiden peretasan terhadap data pemerintah di Indonesia, khususnya terkait dengan Pusat Data Nasional (PDN)	,	

Sumber : Data diolah oleh Diskominfo

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hierarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

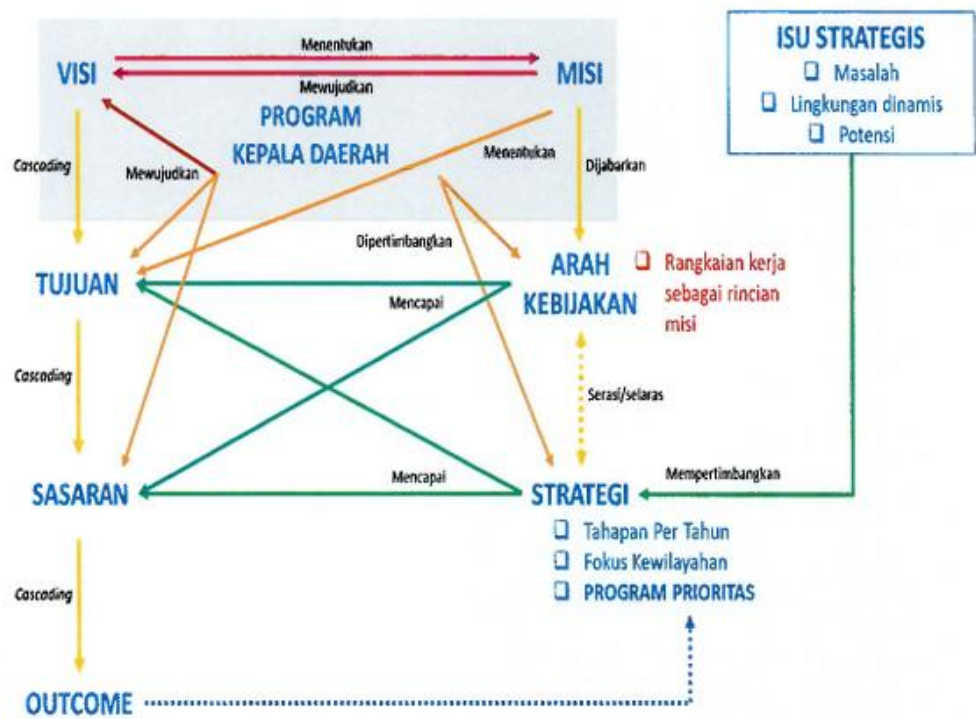
Tujuan Renstra Perangkat Daerah mencakup kebermanfaatan Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sasaran RPJMD, Tujuan Renstra harus sejalan dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD, yaitu target kinerja strategis yang ingin dicapai Kepala Daerah dalam 5 tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital” Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke 5 RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, yaitu: “Penguatan tata Kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Sukabumi dapat tercapai.

3.2. Sasaran ...

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Diskominfo Kota Sukabumi tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1

Konsep Renstra Diskominfo Kota Sukabumi

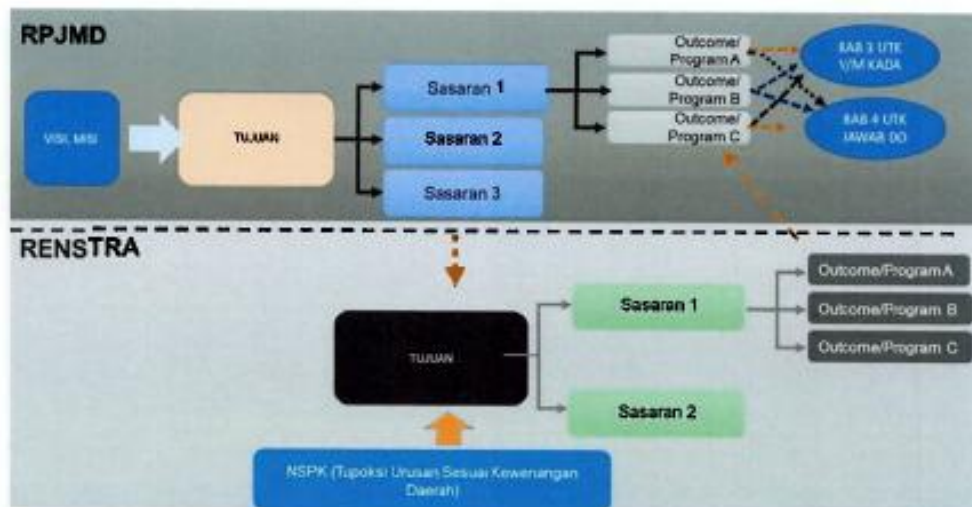
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun

oleh Diskominfo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan;
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah; dan
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dijelaskan pada gambar 3.2 dibawah ini :



Gambar 3.2.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Sukabumi adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur pencapaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ...

- 1. Terwujudnya reformasi birokrasi berdampak di Diskominfo;
- 2. Meningkatnya diseminasi informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- 5. Terwujudnya sistem keamanan informasi pemerintah daerah yang andal dan terintegrasi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital			Indeks SPBE	Poin	3.83	3.87	3.9	3.94	3.97	4.0	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital		Persentase Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Persen	50.1	56.6	57.9	59.7	61	63.8	
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak di Diskominfo	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	Nilai	72.5	73	73.5	74	74.5	75	
		Meningkatnya diseminasi informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks keterbukaan Informasi Publik	Persen	94,50	94.7	94.9	95	95	95	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi	Persen	21.4	25	30	35	40	50	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.85	2.85	2.85	2.95	2.95	3	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terwujudnya sistem keamanan informasi pemerintah daerah yang andal dan terintegrasi	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	251	456	457	458	459	460	

Sumber : Data di olah oleh Diskominfo

Pada tabel 3.1. tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi memunculkan target kinerja tahunan dengan indikator sebagai berikut :

1. **Indeks SPBE** dengan satuan Indeks, secara perhitungan didapatkan dari pengukuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
2. **Persentase Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital** dengan satuan persentase yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi;
3. **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo** dengan satuan Nilai secara perhitungan di dapatkan berdasarkan hasil pengukuran evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Provinsi Jawa Barat yang merupakan nilai agregat dari capaian RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah;
4. **Indeks keterbukaan Informasi Publik (IKP)** dengan satuan Indeks, secara perhitungan diperoleh berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
5. **Persentase Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi** dengan satuan Persentase yang dikeluarkan oleh Dinas Komuinikasi dan Informatika Kota Sukabumi, secara perhitungan di dapatkan dari Jumlah Aplikasi Online dan Terintegrasi dibagi jumlah layanan dikali 100.
6. **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** secara perhitungan didapatkan berdasarkan hasil pengukuran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
7. **Indeks Keamanan Informasi** dengan satuan Indeks secara perhitungan didapatkan berdasarkan hasil pengukuran yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah.

Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Sukabumi, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Sukabumi.

Penahapan renstra adalah prioritas strategi tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukbaumi tahun 2026-2029 dapat terlihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyusunan roadmap transformasi digital daerah sesuai dengan arsitektur SPBE	Optimalisasi SuperApps (simponi) untuk layanan publik yang terpadu	Pengembangan Infrastruktur Digital (peningkatan akses internet, pengembangan pusat data dan penguatan keterbukaan informasi publik)	Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas serta Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data	Monitoring capaian dan perbaikan berkelanjutan

Sumber : Data di olah oleh Diskominfo

Dalam melaksanakan misi yang tercantum dalam RPJMD serta menyesuaikan dengan isu-isu strategis, perumusan arah kebijakan dibagi ke dalam lima tahapan. Proses ini juga memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD provinsi maupun nasional. Melalui pentahapan tersebut, kebijakan yang dirumuskan diharapkan lebih terarah serta responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi.

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran NSPK dan arah Kebijakan RPJMD yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan renstra Diskominfo Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Peraturan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi	•Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Diskominfo	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
2	PermenKominfo No 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	operasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat	•Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Informatika di Pemerintah	
3	PermenKominfo No 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika		•Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	
4	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah		•Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	
5	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah		•Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah	

Sumber : Data di olah oleh Diskominfo

Pada tabel ini menampilkan perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dimana terdapat, 5 NSPK sesuai yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait urusan yang ada di Diskominfo Kota Sukabumi, 1 arah kebijakan RPJMD dan 5 arah kebijakan Renstra PD.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama 5 (lima) tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Di sisi lain posisi kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Berikut kami sampaikan tabel program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kota Berbasis Digital					Indeks SPBE			nilai hasil pengukuran atas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah yang mencakup kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis elektronik.	Berdasarkan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem pemerintahan Berbasis Digital				Persentase Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			ukuran tingkat keterlaksanaan keterbukaan informasi publik serta penerapan SPBE di lingkungan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap standar atau target yang telah ditetapkan	(25% x Tingkat Capaian Keterbukaan Informasi Publik) + (25% Tingkat Capaian Aplikasi Online terintegrasi) + (25% x Tingkat Capaian Nilai IPS) + (25% x Tingkat capaian Indeks KAMI)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak di Diskominfo			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo			Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya reformasi birokrasi telah berhasil dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IRB, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan, semakin bersih dari KKN, dan semakin berkualitas pelayanan publik yang diberikan.	Hasil pengukuran evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui aplikasi SURABI Provinsi Jawa Barat yang merupakan nilai agregat dari capaian RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah di Diskominfo		Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Diskominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Alat ukur yang menilai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan secara internal (RB General) sebagai bagian dari Indeks Reformasi Birokrasi.	Ketercapaian nilai evaluasi reformasi birokrasi general dibagi bobot maksimal dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan kinerja berdasarkan kriteria kelengkapan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu, serta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tercapai di bagi umlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja sesuai kebutuhan dikali 100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan RenjaPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah yang Diampu		Daerah yang Diampu			
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			
				Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketersediaan administrasi pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran,	Jumlah dokumen administrasi keuangan tercapai dibagi jumlah dokumen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	perangkat daerah sesuai ketentuan			pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	administrasi keuangan sesuai kebutuhan dikali 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				anan/Semester an SKPD					
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen dan sistem administrasi kepegawaian yang lengkap, mutakhir, dan sesuai standar yang berlaku	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian tercapai dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
				Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum secara lengkap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar tata naskah dinas, dan prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku	Jumlah dokumen administrasi umum tercapai dibagi jumlah dokumen administrasi umum dikali 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- UndanganyangDise diakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			
				Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kebutuhan barang (RKBMD), baik dari sisi jenis, jumlah, waktu, dan spesifikasi teknis, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo	Jumlah pengadaan barang milik daerah tercapai dibagi jumlah pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan dikali 100%
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang sesuai dengan jenis, volume, spesifikasi, dan waktu yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang tercapai di bagi jasa penunjang sesuai kebutuhan dikali 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah (BMD) yang telah dipelihara secara berkala dan/atau insidental sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), pedoman teknis pemeliharaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menjaga kondisi, fungsi, dan usia pakai barang tersebut.	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah yang tercapai dibagi jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan dikali 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terlaksananya Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terlaksananya Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Meningkatnya diseminasi informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Indeks keterbukaan Informasi Publik			alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana badan publik melaksanakan keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik diperoleh berdasarkan penilaian komisi informasi provinsi jawa barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan/program pemerintah kepada masyarakat		Persentase informasi kebijakan/program pemerintah yang didiseminasikan kepada publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase informasi kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah daerah yang telah direncanakan untuk dipublikasikan dan berhasil disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi publik, baik digital maupun non-digital	Persentase realisasi penyampaian informasi kebijakan atau program pemerintah kepada publik melalui berbagai media, media sosial, radio daerah, atau media luar ruang dibagi dengan jumlah informasi yang telah direncanakan atau dijadwalkan untuk disampaikan selama satu tahun dikali 100
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi untuk Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar sistem informasi/layanan digital yang dibangun pemerintah tersedia dan dimanfaatkan oleh publik	Persentase sistem informasi dan teknologi (portal, layanan digital) milik pemerintah daerah yang dapat diakses masyarakat atau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pemangku kepentingan publik dibagi total sistem informasi yang tersedia dikali 100%
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers,dan 2.terdaftardi Dinas Kominfo,dan 3.aktif dalam kegiatan relasi media	Sub Kegiatan Relasi Media			
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					sesuai peraturan perundangan				
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi			
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Sub Kegiatan Penyusunan Konten			
		Meningkatny a kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi			Persentase Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi				Jumlah Aplikasi Online dan Terintegrasi dibagi jumlah layanan dikali 100%
			Meningkatny a penggunaa n aplikasi inf ormatika di pemerintaha n		Persentase Pengelo laan Aplikasi Infor matika yang Digun akan dalam Pemerintaha n	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Progr am Priori tas RPJMD	merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aplikasi informatika yang digunakan oleh instansi pemerintah dikelola secara aktif (diperbarui, dipantau, dan didukung teknis)	Jumlah PD yang mengelola layanan elektronik dibagi dengan total jumlah PD dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan nama domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		Indikator ini mengukur proporsi Perangkat Daerah yang menggunakan nama domain resmi yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat (domain .go.id) dan subdomain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, dalam penyelenggaraan situs web atau layanan digital lainnya.	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Domain/Subdom ain Resmi dibagi Total Perangkat Daerah dikali 100%
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	umlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domanian Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Meingkatnya Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PD yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	Kegiatan Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		Indikator ini mengukur proporsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Penerapan SPBE.	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen SPBE dibagi Total Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%
				Terlaksananya penyelenggaraa n pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n pusat kendali Pemerintah Daerah			
				Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Interopabilitas data dan Integrasi Layanan			
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			

NSPK ...

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan /atau Portal Data Nasional	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet			
				Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			Representasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah	Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Penggunaan Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		ukuran tingkat data statistik sektoral yang digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan dibagi dengan total jumlah data statistik sektoral yang tersedia dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Meningkatnya Penyelenggaraa n Statistik Sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Kegiatan Penyelenggaraa n Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kabupaten Kota		ukuran tingkat data statistik sektoral yang disediakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan	Jumlah data statistik sektoral yang disediakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan dibagi dengan total jumlah data statistik sektoral yang tersedia dikali 100%
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
				Meningkatnya kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, meta data, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			
				Kinerja : Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Presentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			
		Terwujudnya sistem keamanan informasi pemerintah daerah yang andal dan terintegrasi			Indeks Keamanan Informasi			Instrumen untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001,	SNI ISO/IEC 27001:202 indeks KAMI v5.0

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah		Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		ukuran tingkat keterhubungan jaringan komunikasi sandi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah yang menggunakan jaringan komunikasi sandi yang aman dan andal	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi dibagi dengan total jumlah perangkat daerah dikali 100%
				Terwujudnya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah yang Teramankan	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		ukuran tingkat keamanan aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, ditinjau dari penerapan standar keamanan informasi dan keamanan siber	Jumlah aplikasi yang diamankan melalui mitigasi bencana cyber dibagi jumlah total aplikasi dikali 100%
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			
				Tersedianya Jaring Komunkias Sandi Inter/Intra/antar Perangkat Daerah	Persentase Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi Inter/Intra/antar Perangkat Daerah	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a		ukuran tingkat pemanfaatan jaringan komunikasi sandi yang aman dan andal oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah	Jumah jaring komunikasi sandi yang digunakan antar perangkat daerah dibagi total perangkat daerah dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KET.	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			

Sumber : Data di analisa oleh Diskominfo

Tabel 4.2...

Tabel 4.2

Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah di Diskominfo	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Diskominfo	Persen	46.95	73	5,784,330,443	73.5	5,876,879,730	74	5,876,879,730	74.5	5,965,032,926	75	5,965,032,926	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100	100	43,040,000	100	63,040,000	100	63,040,000	100	74,200,000	100	74,200,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	10,640,000	2	25,640,000	2	23,640,000	2	28,500,000	3	13,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
Kinerja : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokume n	1	1	1,300,000	1	1,300,000	1	1,300,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD														
Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokume n	1	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Kinerja : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokume n	1	1	1,300,000	1	1,300,000	1	1,300,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokume n	1	1	1,300,000	1	1,300,000	1	1,300,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2	1,400,000	2	1,400,000	2	1,400,000	2	2,000,000	2	2,000,000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Kinerja : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	2	2,200,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Kinerja : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
Kinerja : Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	92	1,000,000	93	1,000,000	94	1,000,000	95	1,000,000	96	1,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Kinerja : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000	1	30,000,000	2	45,000,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	
Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
Kinerja : Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Subtansi	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	
Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusatdan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Output : Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	3,857,246,843	100	3,857,246,843	100	3,857,246,843	100	3,892,944,176	100	3,892,944,176	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	322	360	3,849,646,843	392	3,849,646,843	392	3,849,646,843	392	3,885,344,176	392	3,885,344,176	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Kinerja : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
Kinerja : Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan	4	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
Kinerja : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokume n	1	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Output : Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	Persen	100	100	57,750,000	100	57,750,000	100	57,750,000	100	67,750,000	100	67,750,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
Kinerja : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	3	47,750,000	3	47,750,000	3	47,750,000	3	47,750,000	3	47,750,000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	50	10,000,000	55	10,000,000	60	10,000,000	65	20,000,000	70	20,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Output : Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	341,867,800	100	365,132,950	100	365,132,950	100	365,132,950	100	365,132,950	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Kinerja : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	11,330,000	6	11,330,000	6	11,330,000	6	11,330,000	6	11,330,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	12	30,972,950	12	30,972,950	12	30,972,950	12	30,972,950	12	30,972,950	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	54,450,000	12	54,450,000	12	54,450,000	12	54,450,000	12	54,450,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Kinerja : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	65	66	38,050,000	66	38,050,000	66	38,050,000	66	38,050,000	66	38,050,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Kinerja : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganyangDisediakan	Dokume n	12	12	13,240,000	12	13,240,000	12	13,240,000	12	13,240,000	12	13,240,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	284	350	193,824,850	350	217,090,000	350	217,090,000	350	217,090,000	350	217,090,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Output : Tersedianya barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Persen	100	100	84,700,000	100	83,984,137	100	83,984,137	100	99,700,000	100	99,700,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	1	20,000,000	1	19,284,137	1	19,284,137	1	35,000,000	1	35,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel														
Kinerja : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	41	28,200,000	41	28,200,000	41	28,200,000	41	28,200,000	41	28,200,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4	36,500,000	4	36,500,000	4	36,500,000	4	36,500,000	4	36,500,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Persen	100	100	1,155,783,800	100	1,155,783,800	100	1,155,783,800	100	1,155,783,800	100	1,155,783,800	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	64	64	628,514,800	64	628,514,800	64	628,514,800	64	628,514,800	64	628,514,800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Kinerja : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	178,800,000	12	178,800,000	12	178,800,000	12	178,800,000	12	178,800,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	344,969,000	13	344,969,000	13	344,969,000	13	344,969,000	13	344,969,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Output : Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	Persen	100	100	243,942,000	100	293,942,000	100	293,942,000	100	309,522,000	100	309,522,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	140,122,000	18	190,122,000	18	190,122,000	18	200,122,000	18	200,122,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	41	34,400,000	41	34,400,000	41	34,400,000	41	34,400,000	41	34,400,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	7,120,000	1	7,120,000	1	7,120,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	62,300,000	1	62,300,000	1	62,300,000	1	65,000,000	1	65,000,000	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Outcome : Meningkatnya penyebarluasan informasi kebijakan/program pemerintah kepada masyarakat	Persentase informasi kebijakan/program pemerintah yang di diseminasikan kepada publik	Persen	90	92	871,747,000	94	885,694,952	96	885,694,952	98	898,980,376	100	898,980,376	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Output : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi untuk Publik	Persen	100	90	871,747,000	95	885,694,952	100	885,694,952	100	898,980,376	100	898,980,376	
Sub Kegiatan Relasi Media														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers,dan 2.terdaftardi Dinas Kominfo,dan 3.aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	-	3	240,000,000	3	240,000,000	3	240,000,000	3	240,000,000	3	240,000,000	
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
Kinerja : Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komuni tas	12	12	44,000,000	12	48,380,000	12	48,380,000	12	50,535,148	12	50,535,148	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik														
Kinerja : Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permoh onan	3	10	21,000,000	10	26,050,000	10	26,050,000	10	30,000,000	10	30,000,000	
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekome ndasi	4	12	23,000,000	12	26,150,000	12	26,150,000	12	30,000,000	12	30,000,000	
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi														
Kinerja : Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persen	-	50	300,000,000	55	250,000,000	60	250,000,000	65	250,000,000	70	250,000,000	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	-	15	212,247,000	15	261,539,952	15	261,539,952	15	264,870,228	15	264,870,228	
Sub Kegiatan Penyusunan Konten														
Kinerja : Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	-	500	31,500,000	500	33,575,000	500	33,575,000	500	33,575,000	500	33,575,000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Outcome : Meningkatnya penggunaa n aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Pengelolaan A plikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	96	330,472,000	97	335,759,552	98	335,759,552	99	340,795,945	100	340,795,945	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota														
Output : Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan nama domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persen	99.6	100	2,500,000	100	2,500,000	100	2,500,000.00	100	2,500,000	100	2,500,000	
Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domanian Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokume n	99.60	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Output : Meingkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan standar tata kelola dan manajemen SPBE	Persen	100	100	327,972,000	100	333,259,552	100	333,259,552	100	338,295,945	100	338,295,945	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
Kinerja : Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	laporan	-	1	169,000,000	1	169,000,000	1	169,000,000	1	172,000,000	1	172,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
Kinerja : Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokume n	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000.00	1	20,000,000	1	20,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen	Dokume n	-	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Interopabilitas data dan Integrasi Layanan														
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	2	5,000,000	4	5,000,000	6	5,000,000	8	5,000,000	10	5,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokume n	-	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringa Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	PD	-	10	20,472,000	31	25,759,552	31	25,759,552	31	27,795,945	31	27,795,945	
Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan,dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokume n	-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet														
Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PD	-	31	1,000,000	31	1,000,000	31	1,000,000	31	1,000,000	31	1,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
Kinerja : Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE emerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokume n	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
Outcome : Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Penggunaan Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Persen	99.81	100	51,080,000	100	51,897,280	100	51,897,280	100	52,675,739	100	52,675,739	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Persen	99.81	70	51,080,000	70	51,897,280	70	51,897,280	70	52,675,739	70	52,675,739	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
Kinerja : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	-	20	11,550,000	22	11,550,000	22	11,550,000	22	11,550,000	31	11,550,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
Kinerja : Meningkatkan kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	persen	-	70	12,607,000	70	13,424,280	70	13,424,280	70	14,202,739	70	14,202,739	
Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indoensia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, meta data, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	-	60	23,650,000	70	23,650,000	80	23,650,000	90	23,650,000	100	23,650,000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
Kinerja : Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Presentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen	-	60	3,273,000	70	3,273,000	80	3,273,000	90	3,273,000	100	3,273,000	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi														
Outcome : Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Persen	65	84	125,041,450	87	127,042,113	94	127,042,113	97	128,947,745	100	128,947,745	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Terwujudnya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah yang Teramankan	Persen	65	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	1	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
Kinerja : Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	PD	31	31	25,000,000.00	31	25,000,000.00	31	25,000,000.00	31	25,000,000.00	31	25,000,000.00	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
Output: : Tersedianya Jaring Komunkias Sandi Inter/Intra/antar Perangkat Daerah	Persentase Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi Inter/Intra/antar Perangkat Daerah	Persen	100	90	25,041,450	90	27,042,113	90	27,042,113	90	28,947,745	90	28,947,745	
Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kinerja : Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiata n	1	1	25,041,450	1	27,042,113	1	27,042,113	1	28,947,745	1	28,947,745	

Sumber : data di olah oleh Diskominfo

4.2. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan 2025-2029

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Berdasarkan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, Diskominfo Kota Sukabumi menembak Misi 5 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas. Adapun Program Prioritas Diskominfo Kota Sukabumi yang mendukung Program Prioritas Pembangunan beserta pagu indikatif (pagu subkegiatan yang dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Mendukung Misi 5 RPJMD
1			Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2			Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
3			Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
4			Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
5			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Interopabilitas data dan Integrasi Layanan	
6			Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
7			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8			Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
9			Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
10			Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
11			Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	

Sumber : Analisa Oleh Diskominfo

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka target IKU Diskominfo seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tata Kelola Informasi Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Persen	50.1	56.6	57.9	59.7	61	63.8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	Nilai	72.5	73	73.5	74	74.5	75	
3	Persentase Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi	Persen	21.4	25	30	35	40	50	
4	Indeks keterbukaan Informasi Publik	Persen	94,50	94.7	94.9	95	95	95	
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.85	2.85	2.85	2.95	2.95	3	
6	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	251	456	457	458	459	460	

Sumber : Analisa Oleh Diskominfo

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai tolok ukur yang secara langsung merepresentasikan kinerja urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui IKK, setiap sasaran strategis dapat dievaluasi berdasarkan capaian kinerja yang obyektif, terukur, dan akuntabel sehingga arah pembangunan dapat lebih terarah dan fokus. IKK Diskominfo Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikai dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	9.67	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	6.45	12.90	19.35	25.81	32.26	38.71	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.85	2.85	2.85	2.95	2.95	3	
4	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persen	27.34	49.67	49.78	49.89	50.00	50.11	
5	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Diskominfo	Persen	72.5	73	73.5	74	74.5	75	
6	Persentase informasi kebijakan/program pemerintah yang di diseminasikan kepada publik	Persen	90	92	94	96	98	100	
7	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	95	96	97	98	99	100	
8	Persentase Penggunaan Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Persen	77	84	87	94	97	100	

Sumber : Analisa oleh Diskominfo

4.5. Program dukungan Perangkat Daerah terhadap Jabar Istimewa

Berdasarkan RJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi secara struktural tidak termapping langsung ke dalam program/kegiatan utama pencapaian Jabar Istimewa. Namun meskipun demikian, peran Diskominfo tetap memiliki arti strategis sebagai fungsi pendukung yang memperkuat kinerja perangkat daerah lain. Kontribusi Diskominfo lebih banyak bersifat tidak langsung, terutama ...

terutama melalui penguatan aspek transformasi digital pemerintahan, transparansi dan keterbukaan informasi publik, ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral serta keamanan informasi.

Tabel 4.6
Program Dukungan Terhadap Jabar Istimewa

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Langkah Kahiji								
	(Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan)								
2	Langkah Kadua								
	(Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian dan Mendorong Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik)								
3	Langkah Katilu								
	(Pengembangan Pendidikan Berkarakter, SMA/SMK Gratis dan Penambahan Ruang Kelas Baru)								
4	Langkah Kaopat								
	(Pengembangan Lapangan Kerja Baru)								
5	Langkah Kalima								
	(Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus)								
6	Langkah Kagenep								
	(Penanganan Stunting dan Gizi Buruk)								
7	Langkah Katujuh								
	(Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat)								
8	Langkah Kadalapan								
	(Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri)								
9	Langkah Kasalapan								
	(Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi)								

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029

4.6. Program Dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Terhadap Capaian Asta Cita

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dijabarkan melalui Asta Cita, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak transformasi digital, penguatan komunikasi, serta pengelolaan informasi dan keamanan data daerah. Program dukungan Diskominfo Kota Sukabumi terhadap capaian Asta Cita tahun 2025-2030 beserta pagu indikatif di Jabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7
Program Dukungan Terhadap Asta Cita

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA						
PN 1						
Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	256.247.000	313.739.952	313.739.952	324.870.228	324.870.228
PN 2						
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
PN 3						
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
PN 7						
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah dokumen perencanaan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian untuk periode 5 (lima) tahun. Di susun untuk peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati pada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran. Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian baik dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan penilaian. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Sukabumi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika..

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA perlu terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil dari proses pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kedua laporan tersebut menjadi alat perbaikan (*improving*) dalam upaya peningkatan kinerja satuan kerja di masa yang akan datang, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra ini.

Sukabumi, 19 September 2025
WALI KOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

H. AYEP ZAKI